



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (*feed back*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Blitar, 25 Februari 2024

**Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar**



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199003 1 007

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Didalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan diantaranya peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang dan berkelanjutan, penguatan sistem drainase dan jalan, dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2023, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menguraikan pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2023 dari 8 (delapan) sasaran yang sudah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. **Sasaran 1, yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga** dengan indikator Indeks infrastruktur bina marga dari target 76,40% telah terealisasi 79,05% atau tercapai 103,47%.

Permasalahan :

Banyaknya Kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Load) yang melintas di jalan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya, sehingga mengakibatkan berkurangnya usia konstruksi jalan.

Tindaklanjut :

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

2. **Sasaran 2, yaitu Meningkatkan infrastruktur sumber daya air** dengan indikator Indeks infrastruktur sumber daya air dari target 97,75% telah terealisasi 98,42% atau tercapai 100,69%.

Permasalahan :

Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal

Tindaklanjut :

Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran dilingkungannya masing-masing

3. **Sasaran 3, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur cipta karya** dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target 94,70% terealisasi 94,80% atau tercapai 100,11%.

Permasalahan :

Kebutuhan biaya yang cukup besar untuk mewujudkan gedung pemerintah sesuai standart teknis baik untuk perbaikan maupun pemeliharaan

Tindaklanjut :

Mengusulkan skala prioritas penanganan gedung pemerintah untuk memenuhi standart teknis dan setiap tahun dialokasikan pendanaan pemeliharaan

4. **Sasaran 4, yaitu Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi** dengan indikator persentase peran aktif jasa konstruksi dari target 47,83% terealisasi 57,70% atau tercapai 120,64%.

Permasalahan :

Keterbatasan kewenangan dalam pembinaan kompetensi dan perizinan jasa konstruksi

Tindaklanjut :

Meningkatkan koordinasi pembinaan pelaku jasa konstruksi dengan instansi terkait baik dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, Provinsi dan Kementerian

5. **Sasaran 5, yaitu Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem penyediaan air minum (SPAM) dari target 2,70% terealisasi 3,13% atau tercapai 115,93%.

Permasalahan :

- Belum tersedianya tata kelola aset dan belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM,
- Kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM baru

Tindaklanjut :

Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan

6. **Sasaran 6, yaitu Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dari target 9,45% terealisasi 9,36% atau tercapai 99.05%.

Permasalahan :

Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun

Tindaklanjut :

Perlu penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengelola

7. **Sasaran 7, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang** dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target 44,63% terealisasi 52,83% atau tercapai 118,37%.

Permasalahan :

Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara optimal

Tindaklanjut :

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi simtaru dalam rangka menghimpun data pelanggaran pemanfaatan ruang

8. **Sasaran 8, yaitu Meningkatnya kinerja perangkat daerah** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target A 85 terealisasi A 85,48 atau tercapai 100,56%

Permasalahan :

- a. Pengelolaan data belum optimal
- b. Perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi
- c. Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

Tindaklanjut :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemenuhan data baik internal dinas maupun dengan instansi lain
- b. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia dan koordinasi untuk dapat diintegrasikan
- c. Dokumen perencanaan dioptimalkan untuk dapat dijadikan pedoman kerja

Pencapaian kinerja utama / Sasaran Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan tujuan	3
D. Dasar Hukum	3
E. Aspek – Aspek Strategis	5
F. Isu – Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	11
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	12
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	19
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	20

B.	Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	22
1.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	22
2.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	23
3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
C.	Prestasi / Penghargaan.....	28
BAB IV	PENUTUP	29
A.	Kesimpulan	29
B.	Saran	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026	L1
	B. Rencana Kerja Tahun 2023	L2
	C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	L3
	D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	L4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	7
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	9
Tabel 2.3	Program Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	10
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan 2022	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Akhir Periode Renstra 2021-2026	19
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023	21
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023	22
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2023	23
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan, atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakikatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas.

Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahun disusun pelaporannya mulai dari perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP menjadi salah satu kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah terkait kewenangan dan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

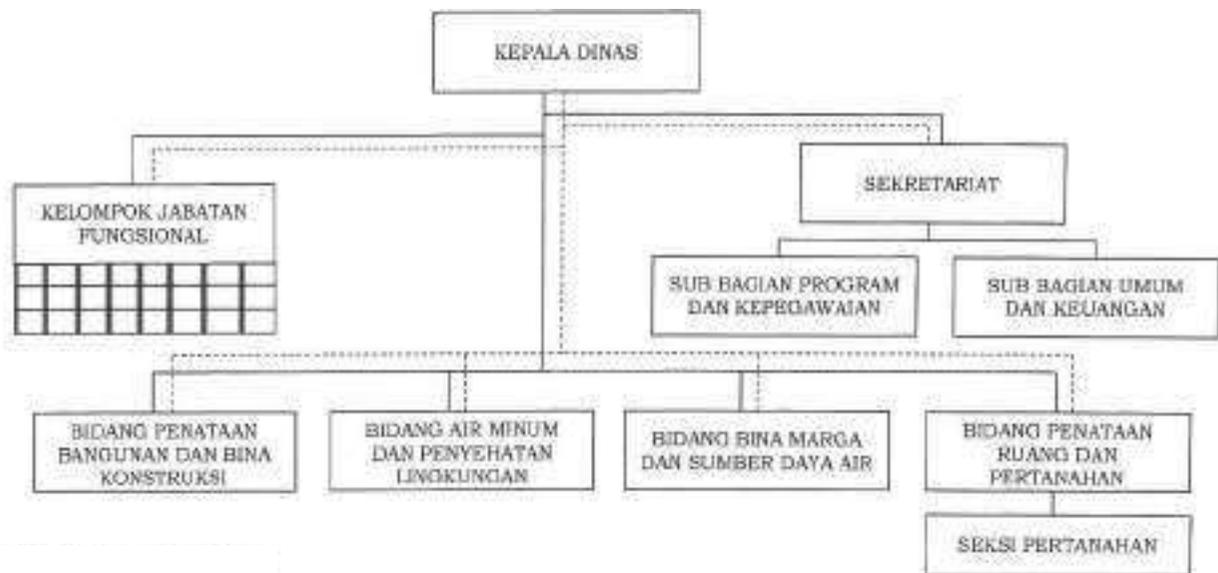
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
- j. Pengembangan jasa konstruksi;
- k. Penyelenggaraan penataan ruang;
- l. Penyelenggaraan pertanahan;
- m. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- o. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;

- q. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- s. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian 1 (satu) Seksi dan kelompok jabatan fungsional, sebagaimana struktur organisasi berikut :



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah ditargetkan dan bagaimana proses pencapaiannya. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKjIP ini adalah memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022;;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. Aspek-Aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 dengan tugas dan fungsi utama sebagai berikut :

- ❖ Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ❖ Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- ❖ Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- ❖ Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- ❖ Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
- ❖ Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
- ❖ Pengembangan jasa konstruksi;
- ❖ Penyelenggaraan penataan ruang;
- ❖ Penyelenggaraan pertanahan;

2. Visi Kota Blitar yang membutuhkan sarana-prasarana perkotaan yang cukup besar;

Berdasarkan aspek-aspek strategis sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, trotoar, drainase, jaringan irigasi, akses sanitasi layak, akses air minum layak, sarana dan prasarana kota serta bangunan gedung pemerintah;
- b. Peningkatan sarana fasilitas kantor pendukung kegiatan;
- c. Penyusunan revisi RDTR yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar :

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan;
2. Penguatan sistem jaringan drainase dan jalan di Kota Blitar;
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.

Erat kaitannya dengan pencapaian Visi Kota Blitar, yaitu Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat, yang mengerucut pada Misi Kota Blitar keempat yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Tata ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada, serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR						
VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat			MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur bina marga
					Meningkatnya Kualitas	Indeks infrastruktur sumber daya air

RPJMD KOTA BLITAR						
VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat			MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
					Infrastruktur Sumber Daya Air	
					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar
					Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi
Meningkatnya kelayakhuan n	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2023 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2023 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76,40 (indeks)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97,75 (indeks)
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,70 (%)
4	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	47,83 (%)
5	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,70 (%)
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,45 (%)
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,63 (%)
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85 (nilai)

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dijabarkan dalam 11 (sebelas) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	14.992.482.240
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.052.384.646
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.953.763.223
4	Program Penataan Bangunan Gedung	5.607.689.040
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	603.861.345
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.136.842.916
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.244.663.687
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.553.632.159
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.750.000
10	Program Penatagunaan Tanah	579.149.139
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.891.814.415
JUMLAH		52.632.032.810

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- b. Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria, yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) / Indikator Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76,40	79,05	103,47
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97,75	98,42	100,69
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,70	94,80	100,11
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	47,83	57,70	120,64
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,70	3,13	115,93

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,45	9,36	99,05
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,63	52,83	118,37
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85	A 85,48	100,56
Rata-rata				107,35

Pada tabel tersebut di atas adalah capaian kinerja pada sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dijabarkan di bawah ini :

a. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga.**

- ❖ Indikator kinerja indeks infrastruktur bina marga, dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik pada tahun 2023 terealisasi 79,05% dari target 76,40% sehingga tercapai 103,47%.
- ❖ Faktor pendorong tercapainya target salah satunya adalah realisasi penanganan preservasi jalan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur bina marga memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Banyaknya Kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Load) yang melintas di jalan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya, sehingga mengakibatkan berkurangnya usia konstruksi jalan.
- ❖ Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

- ❖ Indikator kinerja indeks infrastruktur sumber daya air dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik, pada tahun 2023 terealisasi 98,42% dari target 97,75% sehingga tercapai 100,69%.
- ❖ Faktor pendorong tercapainya target adalah penanganan peningkatan infrastruktur sumber daya air yang dikelola secara bersama lintas instansi dan program fisik RT Keren. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal
- ❖ Tindaklanjut :
Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran dilingkungannya masing-masing

c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

- ❖ Indikator kinerja persentase gedung pemerintah sesuai standar dengan rumus perhitungan jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%, pada tahun 2023 terealisasi 94,80% dari target 94,70% sehingga tercapai 100,11%.
- ❖ Faktor yang menjadi pendorong atas keberhasilan ini adalah penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur cipta karya mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Kebutuhan biaya yang cukup besar untuk mewujudkan gedung pemerintah sesuai standart teknis baik untuk perbaikan maupun pemeliharaan
- ❖ Tindaklanjut :
Mengusulkan skala prioritas penanganan gedung pemerintah untuk memenuhi standart teknis dan setiap tahun dialokasikan pendanaan pemeliharaan

d. Sasaran Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi,

- ❖ Indikator kinerja persentase peran aktif jasa konstruksi dengan rumus perhitungan jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%, pada tahun 2023 terealisasi 57,70% dari target 47,83% sehingga tercapai 120,64%.
- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dengan dukungan adanya peningkatan kompetensi dan kualifikasi jasa konstruksi sehingga banyak berperan dan diberdayakan di seluruh kegiatan konstruksi. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kompetensi jasa konstruksi mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Keterbatasan kewenangan dalam pembinaan kompetensi dan perizinan jasa konstruksi
- ❖ Tindaklanjut :
Meningkatkan koordinasi pembinaan pelaku jasa konstruksi dengan instansi terkait baik dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, Provinsi dan Kementerian

e. Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM,

- ❖ indikator persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2023 terealisasi 3,13% dari target 2,70% dengan tingkat capaian 115,93%.
- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dikarenakan semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Belum tersedianya tata kelola aset dan belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM dan kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM baru
- ❖ Tindaklanjut :
Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM, termasuk penyediaan lahan untuk pembanguna

f. **Sasaran meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD,**

- ❖ Indikator persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2023 terealisasi 9,36% dari target 9,45% dengan capaian 99,05%.
- ❖ Faktor yang menjadi Pendorong tingkat keberhasilan ini dikarenakan besarnya pengelolaan SPALD berbasis masyarakat serta sumber pendanaan yang lebih besar dari DAK. Meskipun demikian, jika dilihat dari angka target dengan angka realisasi, capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun
- ❖ Tindaklanjut :
Perlu penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengelola

g. **Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang,**

- ❖ Indikator persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan rumus perhitungan rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang, pada tahun 2023 terealisasi 52,83% dari target 44,63% sehingga tercapai 118,37%.
- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara optimal
- ❖ Tindaklanjut :
Mengoptimalkan penggunaan aplikasi simtaru dalam rangka menghimpun data pelanggaran pemanfaatan ruang

h. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah,**

- ❖ Dengan rumus perhitungan nilai SAKIP perangkat daerah, pada tahun 2023 memperoleh nilai A (85,48) dari target nilai A (85) atau tercapai 100,56%.
- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya kinerja perangkat daerah melalui peningkatan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**.

❖ Permasalahan :

- Pengelolaan data belum optimal
- Perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi
- Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

❖ Tindaklanjut :

- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemenuhan data baik internal dinas maupun dengan instansi lain
- Memanfaatkan aplikasi yang tersedia dan koordinasi untuk dapat diintegrasikan
- Dokumen perencanaan dioptimalkan untuk dapat dijadikan pedoman kerja

Dari uraian capaian kinerja tersebut di atas, rata-rata tingkat keberhasilan dari 8 (delapan) sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebesar **107,35%** atau mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022–2023

Perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76,20	77,10	76,40	79,05
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97	97	97,75	98,42
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,60	94,60	94,70	94,80
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	43,48	71,60	47,83	57,70
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,45	0,25	2,70	3,13

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,07	0,27	9,45	9,36
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	40,55	57,33	44,63	52,83
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,43	A 84,21	A 85	A 85,48

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa untuk :

- a. **Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga** pada tahun 2023 dengan target 76,40% terealisasi 79,05% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi 77,10%.
Hal ini dikarenakan dukungan pendanaan yang cukup besar terhadap penanganan infrastruktur bina marga, terutama jalan dan bangunan pelengkap yang bersumber dari APBN;
- b. **Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** pada tahun 2023 dengan target 97,75% terealisasi 98,42% dan mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi 97%.
Hal ini disebabkan karena semakin besarnya dukungan pendanaan dan penanganan infrastruktur sumber daya air yang dikelola oleh beberapa instansi;
- c. **Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** pada tahun 2023 dengan target 94,70% terealisasi 94,80% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi 94,60%.
Hal ini disebabkan karena cukup besar dukungan pemenuhan standar bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah pengguna/pengelola;
- d. **Capaian kinerja Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi** pada tahun 2023 dari target 47,83% terealisasi 57,70% dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 71,60%.
Penurunan ini dikarenakan volume kegiatan konstruksi yang tidak sebanyak tahun sebelumnya;

e. **Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM** pada tahun 2023 dari target 2,70% terealisasi 3,13% dan mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi 0,25%.

Hal ini dikarenakan dukungan yang cukup besar dari sumber pendanaan DAK sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk penyediaan akses air minum;

f. **Capaian kinerja Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** pada tahun 2023 dengan target 9,45% terealisasi 9,36% dan mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi 0,27%. Walaupun target tahun 2023 tidak terealisasi namun mengalami kenaikan dari capaian tahun 2022, yang dikarenakan semakin meningkatnya kepedulian masyarakat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah domestik;

g. **Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang** pada tahun 2023 dengan target 44,63% terealisasi 52,83% dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi 57,33%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 semakin ditingkatkan tertib pemanfaatan ruang kota terutama pada area yang menjadi penanganan prioritas nasional;

h. **Capaian kinerja Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A (85,48) melebihi target nilai A (85) pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mendapat nilai A (84,21). Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya beberapa indikator akuntabilitas kinerja yang telah ditentukan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 2023 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan akhir periode renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	77	79,05	102,66
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	98,42	98,42

SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	95	94,80	99,79
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	60,87	57,70	94,79
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3,44	4,85	140,99
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10,56	7,36	69,70
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	58,21	52,83	90,76
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 86	A 85,48	99,40

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga pada tahun 2023 terealisasi 79,05% yang melebihi target pada akhir periode renstra 77%, hal ini dikarenakan peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa.

Sedangkan pada sasaran Meningkatkan Akses Air Minum Layak melalui SPAM pada tahun 2023 terealisasi 4,85% yang melebihi target pada akhir periode renstra 3,44%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendanaan yang bersumber dari DAK dan kepedulian masyarakat akan pentingnya akses air minum layak.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang menjadi bagian dari SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Sedangkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui dua cara yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2023 dapat dilihat realisasi SPM sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja SPM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94	98.7	105
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97	99.21	102.3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, pada meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, indikator persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan terealisasi 99.21% dari target 97% tercapai 102.3% dan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 98.27%. Hal ini ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya akses sanitasi layak dan sinergitas program kegiatan lintas sector. Adapun Tindakan untuk mempertahankan atau meningkatkan meningkatkan pencapaian rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut :

- ❖ Dilaksanakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- ❖ Usulan adanya penambahan alokasi pagu anggaran dimana tidak hanya bersumber dari DAK namun dari APBD karena sangat menunjang ketercapaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- ❖ Dilaksanakan sosialisasi yang masif bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak

Sedangkan untuk indikator persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan terealisasi 98.7% dari target 94% tercapai 105% dan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 98,38%, peningkatan ini dapat tercapai karena beberapa faktor pendukung di antaranya :

- ❖ Peran serta BUMD PDAM;
- ❖ Peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM masyarakat); dan
- ❖ Peran aktif Pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk capaian air minum yang layak.

B. Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Program penyelenggaraan jalan	14.992.482.240
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air	13.052.384.646
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Program penataan bangunan gedung	5.607.689.040
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	603.861.345
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.136.842.916
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2.244.663.687

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.953.763.223
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.553.632.159
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.750.000
		Program Penatagunaan Tanah	579.149.139
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.891.814.415
JUMLAH			52.037.133.671

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2023 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,40	99,50	100,10	14.992.482.240	14.588.091.688	97,30
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	99,70	119,60	119,96			
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	97	98,42	101,46	13.052.384.646	12.746.396.851	97,66

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah yang dibangun	86,96	100	115	5.607.689.040	5.390.461.253	96,13
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	82,61	82,61	100			
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	100	100	100	603.861.345	465.394.069	77,07
Meningkatnya Akses Air Minum yang layak melalui SPAM	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	88,90	91,70	103,15	1.136.842.916	855.496.000	75,25
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Persentase SPALD dalam kondisi baik	83	92,30	111,2	2.244.663.687	2.026.567.829	90,28
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98,5	98,5	100	6.953.763.223	6.514.010.987	93,68
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	81,58	100	122,58	1.553.632.159	1.493.613.742	96,14
Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A 85	A 85,48	100,56	5.891.814.415	5.720.785.527	97,10

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	110,03	97,30	1,13
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	101,46	97,66	1,04
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	107,5	96,13	1,12
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	100	77,07	1,30
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	103,15	75,25	1,37
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	111,2	90,28	1,23
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	122,58	96,14	1,28
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,56	97,10	1,04

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga** dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Bina Marga tingkat efisiensinya sebesar 1,13%, bahwa dengan capaian kinerja 110,03% membutuhkan anggaran sebesar 97,30% dari total pagu anggaran penyelenggaraan jalan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian

pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan Faktor Pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Koordinasi yang masif dalam upaya mempercepat capaian kinerja,
- ❖ Kerjasama Tim yang solid

b. **Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air tingkat efisiensinya sebesar 1,04% bahwa dengan capaian kinerja 101,46% membutuhkan anggaran sebesar 97,66% dari total pagu anggaran pengelolaan sumber daya air. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung Pencapaian Kinerja,
- ❖ Koordinasi yang baik

c. **Sasaran 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** dengan indikator kinerja Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar tingkat efisiensinya sebesar 1,12%, bahwa dengan capaian kinerja 107,5% membutuhkan anggaran sebesar 96,13% dari total pagu anggaran pengelolaan bangunan gedung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Terselenggaranya bangunan Gedung pemerintah yang memenuhi standart

d. **Sasaran 4 yaitu Meningkatkan Kompetensi Jasa Konstruksi** dengan indikator kinerja Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi tingkat efisiensi sebesar 1,30%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 77,07% dari total pagu anggaran pembinaan jasa konstruksi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peran serta Badan Usaha dalam proses perijinan Jasa konstruksi

- e. **Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM** dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tingkat efisiensi sebesar 1,37%, bahwa dengan capaian kinerja 103,15% membutuhkan anggaran sebesar 75,25% dari total pagu anggaran pengelolaan sistem penyediaan air minum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :
- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
 - ❖ Sarana dan prasarana yang memadai
 - ❖ Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung untuk Pencapaian Kinerja
- f. **Sasaran 6 yaitu Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tingkat efisiensi sebesar 1,23%, bahwa dengan capaian kinerja 111,2% membutuhkan anggaran sebesar 90,28% dari total pengelolaan air limbah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**, dengan factor pendukung antara lain :
- ❖ Peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder terkait;
- g. **Sasaran 7 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, tingkat efisiensi sebesar 1,28%, bahwa dengan capaian kinerja 122,58% membutuhkan anggaran sebesar 96,14% dari total pagu anggaran penyelenggaraan tata ruang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**. Dengan factor pendukung anytara lain :
- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
 - ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
 - ❖ Kerjasama Tim,
 - ❖ Koordinasi yang baik
- h. **Sasaran 8 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat efisiensi sebesar 1,04%, bahwa dengan capaian kinerja 100,56% membutuhkan anggaran sebesar 97,10% dari total pagu anggaran penunjang urusan pemerintah daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
- ❖ Fasilitasi kantor yang memadai,
- ❖ Anggaran yang tersedia

C. Prestasi/Penghargaan

- ❖ Selama tahun 2023 tidak ada prestasi/penghargaan skala nasional maupun regional yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Blitar, namun pada tahun 2023 telah direalisasikan preservasi jalan di 7 (tujuh) ruas jalan kota dengan lokasi sebagai berikut :

1. Jl. Cokroaminoto sepanjang 0.282 km
2. Jl. Dr. Wahidin sepanjang 1,243 km
3. Jl. Bromo sepanjang 0,152 km
4. Jl. Raung sepanjang 0.218 km
5. Jl. Jati sepanjang 1.071 km
6. Jl. Widuri sepanjang 1.395 km
7. Jl. Kelapa Gading sepanjang 1.057 km

melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023. (*Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Kelapa Gading Kota Blitar CS antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Kota Blitar Nomor : 6671/BA/Bb8.7/2023*)

- ❖ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai Kontributor penerimaan terbesar Wajib Pajak Instansi Pemerintah Tahun 2023



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga** dengan indikator indeks infrastruktur bina marga dari target 76,40% telah terealisasi 79,05% pada tahun 2023 atau tercapai 103,47%.
2. **Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan indikator indeks infrastruktur sumber daya air dari target 97,75% telah terealisasi 98,42% atau tercapai 100,69%.
3. **Sasaran 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target 94,70% terealisasi 94,80% atau tercapai 100,11%.
4. **Sasaran 4 yaitu Meningkatkan Kompetensi Jasa Konstruksi** dengan indikator persentase peran aktif jasa konstruksi dari target 47,83% terealisasi 57,70% atau tercapai 120,64%.
5. **Sasaran 5 yaitu Meningkatkan Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem penyediaan air minum (SPAM) dari target 2,70% terealisasi 3,13% atau tercapai 115,93%.
6. **Sasaran 6 yaitu Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dari target 9,45% terealisasi 9,36% atau tercapai 99,05%.
7. **Sasaran 7 yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target 44,63% terealisasi 52,83% atau tercapai 118,37%.

8. **Sasaran 8 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target A (85) terealisasi A (85,48) atau tercapai 100,56%.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama / Sasaran Strategis dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan **BAIK**, walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Tindak lanjut perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, yaitu :

1. Optimalisasi fungsi pengendalian dan melaksanakan penyusunan revisi RDTR dan revisi RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sinkronisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi seluruh infrastruktur pekerjaan umum;
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung dan fasilitas umum;
4. Optimalisasi pengelolaan air limbah domestik; dan
5. Peningkatan akses air minum.

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	70% Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum + 30% Level of Service	58,07	58,37	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	50% Bina Marga + 40% Sumber Daya Air + 10% Cipta Karya	85,47	86,77	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya	
											Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya	
											Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya	
											Peningkatan ketersediaan jembatan	
											Optimalisasi pemeliharaan jembatan	
											Optimalisasi rehabilitasi jembatan	
										Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
											Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	
										Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung	
											Peningkatan ketersediaan bangunan gedung	
										Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota	
											Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota	
										Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi	
											Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	
											Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBUAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
					Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	95,14	93,4	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL	
						Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	89,37	98,7	Peningkatan akses air minum	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	
					Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	95,30	95,73	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang	
											Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
											Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	
										Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang	

Blitar, 25 Februari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perencanaan Ruang Kota Blitar



Ir. ERNA SANTIL MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199803 2 004

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastrukur Bina Marga	76,40%	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,40							14.992.482.240,00
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	99,70							
							Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	5,09				14.992.482.240,00
								Persentase jembatan yang dibangun	50,00				
								Persentase jembatan yang dipelihara	6,12				

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3	640.000.000,00
										Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	9.354.931.578,00
										Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2	2.978.610.663,00
										Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	1.100.000.000,00
										Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	20	0
										Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	4	189.999.999,00
										Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	3	628.940.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	400	100.000.000,00
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97,75%	Program pengelolaan sumber daya air	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	97,00							13.052.384.646,00
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Peningkatan dan Pemeliharaan	10,39				13.052.384.646,00
										Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3,00	300.000.000,00
										Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,53	3.258.877.451,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,74	5.904.882.331,00
										Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,49	3.588.624.864,00
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipa Karya	Presentase Gedung Pemerintah Sesuai Standart	94,70%	Program penataan bangunan gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	86,96							5.607.689.040,00
					Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	87,5							
							Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung	100,00				5.607.689.040,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5,00	370.406.430,00
										Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2,00	5.237.282.610,00
4	Meningkatnya Kompetensi Jasa konstruksi	Presentase Peran Aktif Jasa konstruksi	47,83%	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100,00							603.861.345,00
							Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	77,02				395.864.763,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100,00	135.940.698,00
										Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	250,00	259.924.065,00
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	40				159.388.582,00
										Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1,00	5.400.000,00
										Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2,00	49.450.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak melalui SPALD	Presentase rumah tangga yang memiliki Akses Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,45	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	83,00							2.244.663.687,00
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Persentase SPALD yang terbangun	68.42.00				2.244.663.687,00
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	325.687.302,00
										Rehabilitasi/Peringkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	10	134.000.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	25	842.000.000,00
										Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10	117.282.739,00
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan	2	100.000.000,00
										Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	50	458.616.000,00
										Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	36	126.074.496,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Rehabilitasi/Perin gkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	20	141.003.150,00
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98,50							6.953.763.223,00
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1,35				6.953.763.223,00
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	172.573.310,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.500	4.562.981.113,00
										Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	250	1.754.208.800,00
										Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1	164.000.000,00
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	400	300.000.000,00
7	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	44,63	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	81,58							1.553.632.159,00
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR kota	100,00				102.187.423,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2	102.187.423,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100,00				775.000.000,00
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	2	775.000.000,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	100,00				326.146.623,00
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12	251.146.623,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	75.000.000,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	100,00				350.298.113,00
										Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	350.298.113,00
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100,00							15.750.000,00
							Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti	100,00				15.750.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	15.750.000,00
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	97,00							579.149.139,00
							Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun sesuai regulasi	100,00				579.149.139,00
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	50.000.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	529.149.139,00
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	85,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70							5.891.814.415,00
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100,00				27.076.148,00
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2.076.148,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	25.000.000,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100,00				4.206.627.200,00
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.204.459.340,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	2.167.860,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100,00				113.640.936,00
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	63.143.536,00
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	50.497.400,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100,00				695.283.637,00
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	29.972.822,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	225.011.697,00
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	2.966.868,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	58.410.000,00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	40.758.250,00
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	6.600.000,00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	301.080.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	30.484.000,00
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100,00				156.264.444,00
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32	123.157.530,00
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	33.106.914,00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100,00				304.891.098,00
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	72.841.098,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104	232.050.000,00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100,00				388.030.952,00
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	210.006.400,00
										Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39	18.200.000,00
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	43.760.400,00
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	80.583.952,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	35.480.200,00

Blitar, Februari 2024

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

Kota Blitar



Ir. ERNA SANTI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199803 2 004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHARYONO,SH.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**

Jabatan : Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 20 Oktober 2023

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

SUHARYONO,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251990031007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94.70 (%)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	97.75 (indeks)
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	76.40 (indeks)
4	Meningkatnya kompetensi Jasa konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa konstruksi	47.83 (%)
5	Meningkatnya Akses Air Minum Yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.70 (%)
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD)	9.45 (%)
7	Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanPenataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	44.63 (%)
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85.00 (nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,553,632,159.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	603,861,345.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14,992,482,240.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	579,149,139.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5,607,689,040.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6,953,763,223.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,244,663,687.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
8	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	15,750,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,136,842,916.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13,052,384,646.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,891,814,415.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Jumlah		52.632.032.810,00	

Blitar, 20 Oktober 2023



Wali Kota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

SHARYONO,SH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196509251990031007

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun

: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
: 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	76,40	79,05	103,47		Program penyelenggaraan jalan	14.992.482.240	14.588.091.688	97,30	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	97,75	98,42	100,69		Program pengelolaan sumber daya air	13.052.384.646	12.746.396.851	97,66	
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	94,70	94,8	100,11		Program penataan bangunan gedung	5.607.689.040	5.390.461.253	96,13	
4	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%,	47,83	57,70	120,64		Program pengembangan jasa konstruksi	603.861.345	465.394.069	77,07	
5	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%	2,7	3,13	115,93		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.136.842.916	855.496.000	75,25	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%	9,45	9,36	99,05		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2.244.663.687	2.026.567.829	90,28	
								Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.953.763.223	6.514.010.987	93,68	
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	44,63	52,83	118,37		Program penyelenggaraan penataan ruang	1.553.632.159	1.493.613.742,00	96,14	
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	nilai SAKIP perangkat daerah	A 85	A 85,48	100,56		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.891.814.415	5.720.785.527,00	97,10	

Blitar, Februari 2024

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar



Dr. ERNA SANTI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199803 2 004